

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 12
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 5 September 2023
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024; dan
2. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 29 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal);
2. Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya);
3. Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);
4. Dr. Budi Sulistiyo, M.Si. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan);
5. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H. (Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut);
6. Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan);

7. Ir. Teuku Nilwan, M.M. (Plt. Inspektur Jenderal);
8. Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap); dan
9. Ir. Ishartini (Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, membahas RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebesar Rp7.046.659.869.000,00 (tujuh triliun empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - 1) **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp657.219.184.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 2) **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp86.285.440.000,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3) **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp940.673.896.000,00 (sembilan ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - 4) **Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**, sebesar Rp1.217.075.027.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar tujuh puluh lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - 5) **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.135.513.469.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- 6) **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp384.932.965.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 7) **Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**, sebesar Rp654.360.873.000,00 (enam ratus lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - 8) **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.449.130.956.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan
 - 9) **Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp521.468.059.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp1.309.900.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Provinsi, sebesar Rp489.128.443.307,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - 2) Kabupaten/Kota, sebesar Rp820.771.556.693,00 (delapan ratus dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebanyak 61,85% atau sebesar Rp3.250.558.836.343,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dari Pagu Efektif Pasca *Automatic Adjustment* sebesar Rp6.303.824.024.000,00 (enam triliun tiga ratus tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta dua puluh empat ribu rupiah).
 3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merealokasi bantuan pemerintah Tahun 2023 yang penyerapannya di bawah 60% atau yang belum menyampaikan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) paling lambat 15 September 2023 untuk dapat digunakan di wilayah lain.
 4. Komisi IV DPR RI meminta Eselon I Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tahun 2024 memberikan bantuan pemerintah sesuai dengan kebutuhan nelayan, pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar hasil kelautan perikanan, serta petambak garam dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk usulan tambahan alokasi anggaran di Tahun 2024 sebesar Rp986.400.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) diperuntukkan pada bantuan pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat agar pelaku usaha sektor kelautan perikanan bertambah dan merata di seluruh wilayah nusantara.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti saran dan masukan Komisi IV DPR RI terkait dengan program dan kegiatan Tahun 2024, serta permasalahan masyarakat kelautan perikanan di Tahun 2023, seperti perizinan kapal, perizinan PKPRL, bimtek, penangkapan ikan terukur, kebakaran kapal perikanan, pelabuhan perikanan, asuransi nelayan, BBM subsidi nelayan, kebijakan pengelolaan lobster, pupuk tambak, sentra perikanan/pasar ikan, nilai tambah dan daya saing, pelatihan, pengawasan IUU *Fishing*, MLIN, sampah laut, serta permasalahan lainnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Antam Novambar

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151